



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jln. Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) / Jln. G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya
Telp. (0536) 3242606 – Fax. (0536) 3242606
Email : kesbangpol@palangkaraya.go.id dan Website : kesbangpol.palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 900/62.1/BKBP/I/2025

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)BADAN KEATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuandalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya berkewajiban melaporkan Pencapaian Kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KEATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024;

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Palangka Raya;

KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2024 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana

terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 31 Januari 2025



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palangka Raya

BOY YEPHANUS, S.E, M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19720803 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2024, harus dilakukan Evaluasi Tingkat Capaian Keberhasilannya.

Capaian Keberhasilan / Kinerja yang terakreditasi melalui penilaian dengan standar yang telah ditetapkan sebagai pembandingan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disesuaikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Visi dan Misi Instansi Pemerintah dalam kerangka perwujudan Good Governance.

Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kritik, saran dan pemikiran yang sifatnya membangun sangatlah diperlukan dimasa-masa datang.

Sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama segenap rekan-rekan pejabat/staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas bantuan dan kerja kerasnya dalam pelaksanaan Tugas selama Tahun 2024 ini.

Palangka Raya, 31 Januari 2025



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

BOY YEPHTHANUS, S.E, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19720803 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi	4
1.5 Permasalahan Umum	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis	8
2.3 Kebijakan dan Program	9
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	20
A. Capaian Indikator Kinerja	20
A.1	
A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	20
3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir	23
3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini Dengan jangka menengah yang terdapat	23
3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional	24
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2024	24
3.5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya	25
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	34
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024	34
BAB. IV PENUTUP	38
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis	38
Lampiran	39
Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Fakta Kota Integritas dan Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Individu Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mengacu dari Visi dan Misi serta Rencana Strategis sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Aspek Strategis yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan Politik adalah berupa Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan capaian kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, berkaitan dengan kondisi Sosial Ekonomi, Kultural, sehingga berbagai Gejolak Sosial semakin berkurang dan Sinergisme Komunikasi Sosial serta Komunikasi Politik dalam rangka menunjang Pembangunan menjadi semakin ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran Program Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilakukan, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya dapat dikategorikan cukup baik, namun harus dilakoni bahwa masih banyak sasaran yang belum tersentuh capaian target yang diinginkan dalam tahun 2024 dan sebagai langkah perencanaan strategis tahun berikutnya.

Demikian pula Capaian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Kategori Capaian Cukup Baik karena dalam pelaksanaannya dapat memenuhi target kegiatan seperti yang direncanakan.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja Tahun 2024.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

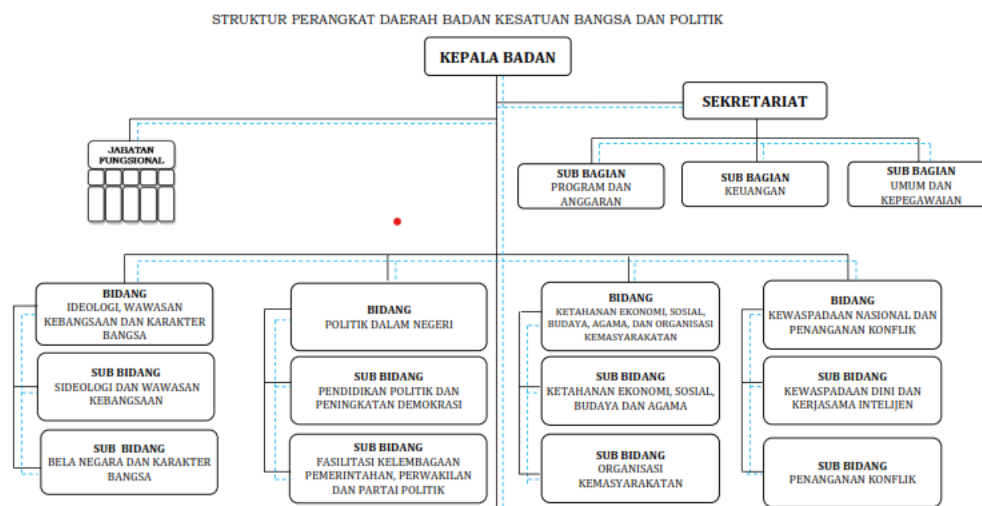
Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya yaitu pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Untuk mengaktualitas tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai struktur organisasi seperti di tunjuk pada gambar 1.1 pada halaman berikut .



1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusifitas daerah dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk

degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya paham sarat kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualitas Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena sebagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elitanya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitas dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- (1) Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam politik ;
- (2) Menurunnya nilai – nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Fasilitasi pendirian tempat ibadah masih diperlukan karena masyarakat banyak yang kurang paham.
- (4) Pengawasan terhadap orang asing masih lemah.
- (5) Reformasi tentang deteksi dini masih kurang sarana dan prasarana.
- (6) Kesadaran masyarakat masih kurang terutama menyangkut keamanan dan ketertiban.

1.6 Sistematika Penyajian.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategi Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

- 2.1 Rencana Strategis 2024 - 2026
- 2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis
- 2.3 Kebijakan dan Program
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
- 3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2024 dengan tahun 2023 dan Tahun Terakhir
- 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 20234 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
- 3.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2024-2026

Dengan berdasarkan pada tupoksi dan tugasnya yang mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai salah satu instansi yang mendukung terciptanya dan terjaganya ketertiban dan ketentraman diwilayah Kota Palangka Raya dengan berpedoman pada analisis isu-isu strategis yang tertuang dalam RPD Kota maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam pencapaian kinerja pada perencanaan strategis dan program umum pembangunan secara garis besar adalah :

1. Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan
2. Kurangnya pemahaman arti pentingnya koordinasi
3. kurang terdeteksinya situasi dan kondisi daerah
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

5.	T a b e l 1	VISI	Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang		
		MISI II	Mewujudkan kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera, Harmonis, Dinamis, Rukun dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Falsafah Huma Betang		
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Peningkatan pelayanan, keamanan dan pelayanan publik	Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palangka Raya

Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat** dan sasaran Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat dilakukan dengan **strategi** : Peningkatan pelayanan keamanan dan pelayanan publik **Arah kebijakan** : Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palangka Raya.

Untuk melaksanakan Misi tersebut dibuat program kerja meliputi :

- a. Memanfaatkan iklim kondusif, sosial / Politik masyarakat secara bijaksana untuk partisipasi pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Menyelenggarakan Koordinasi.
- d. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat sekitar Kesatuan Bangsa, Integrasi Kebangsaan.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

2.2 TUJUAN / SASARAN STRATEGIS.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah **Meningkatnya kerukunan masyarakat** dengan sasaran **Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat** merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang dijabarkan dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Indeks Toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	-	-	13	11	10

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses Perencanaan Strategis Organisasi dari Tahun ketahun Anggaran berikutnya sejalan dengan rumusan untuk masing-masing tujuan yang ingin di capai dalam Tahun Anggaran bersangkutan.

2.3 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Penguatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
2. Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

b. Program

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 yaitu :

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 antara lain ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan atau sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendukung Sasaran Strategis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Eselon II)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formula	Target	Penanggung jawab
	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Indeks toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mendukung Sasaran Strategis Eselon III

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
----	-----------------	-------------------	--------	--------	------------------

1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Persentase capaian TKDN belnaja OPD 60%	Nilai % %	B (60-70) 100 60	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Eselon III)
2	Meningkatnya anak bangsa yang mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Persentase	100	Kabid. Ideologi Bangsa, Wasbang dan Karakter Bangsa (Eselon III)
3	Meningkatnya kesadaran Ormas dalam melaporkan keberadaannya	Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	Persentase	100	Kabid. Ketahanan Ekososbud, Agama dan ormas (Eselon III)

4	Meningkatnya kesadaran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan analisa ekonomi sosial budaya	1.Jumlah Kegiatan FKUB 2.Persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (bersih narkoba)	Kegiatan Persentase	10 100	Kabid. Ketahanan Ekososbud, Agama dan ormas (Eselon III)
5	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik	Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya	Persentase	75	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Eselon III)
6.	Tersalurnya dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	%	100	Kabid. Politik Dalam Negeri (Eselon III)

2.6 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran/Indikator		PERJANJIAN KINERJA						Penanggung jawab
		Satuan Target	Formula	Target Kumulatif				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
Sasaran 1	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat							
1.1	Sasaran : Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	Peringkat Nasional	Hasil Penilaian dari setara Institute	13	13	13	13	Kepala Badan
Sekretaris Badan								
Program 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai B (60-70)	Hasil Evaluasi dari Tim penilaian APIP	70	70	70	70	Sekretaris
1.2	Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase	Jumlah rekomendasi dibagi dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
1.3	Persentase capaian TKDN belanja OPD 60%	%	Realisasi PDN (Rp) / RUP PDN (Rp) x 100%	60%	60%	60%	60%	Sekretaris
Kegiatan 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sasaran 1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang memadai	Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	3	4	6	Sekretaris
Sub Kegiatan 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Sasaran 1	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah							
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	3	4	6	Sekretaris
Kepala Bidang POLITIK DALAM NEGERI								
Program 1	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik							
Sasaran 1	Tersalurnya dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik							
1.1	Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	Persentase	Jumlah Penerima Dana Hibah / Jumlah Penerima Dana Hibah yang tersalurkan x 100%	30%	50%	80%	100%	Kabid Poldagri
Kegiatan 1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik							
Sasaran 1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik							
1.1	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	dokumen	Jumlah Laporan	0	5	5	10	Kabid Poldagri

Sasaran/Indikator				PERJANJIAN KINERJA					Penanggung jawab	
				Satuan Target	Formula	Target Kumulatif				
						TW I	TW II	TW III		TW IV
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah							
		Sasaran 1	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	Jumlah Orang	0	0	16	32	Kabid Poldagri
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat										
Program 1		Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya								
Sasaran 1		Meningkatnya kesadaran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan analisa ekonomi sosial budaya								
1.1	Jumlah Kegiatan FKUB			Kegiatan	Jumlah Kegiatan	3	5	7	10	Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas
1.2	Persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (bersih narkoba)			Persentase	Jumlah Indikator yang terpenuhi / jumlah Indikator yang ditetapkan x 100%	25%	50%	75%	100%	Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas
	Kegiatan 1	Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial, budaya								
	Sasaran 1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial, budaya								
1.1	Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya	Dokumen	Jumlah Dokumen	0	3	6	6	Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas		
	Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah								
	Sasaran 1	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah								
1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	Jumlah Orang	0	3	6	6	Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas		
Program 2 Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
Sasaran 1		Meningkatnya kesadaran Ormas dalam melaporkan keberadaannya								
1.1	Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	Persentase	Jumlah Ormas yang melaporkan keberadaannya / Jumlah Ormas yang dibina x 100%	25%	50%	75%	100%	Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas		
	Kegiatan 1	Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas								
	Sasaran 1	Terlaksananya Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas								
1.1	Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	Dokumen	Jumlah Dokumen	0	8	12	16	Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas		

Kepala Bidang KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK											
Program 1		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial									
Sasaran 1		Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik									
1.1	Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya			Persentase	Jumlah dukungan yang diberikan / jumlah dukungan yang diperlukan x 100%	20%	40%	60%	75%	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
	Kegiatan 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
	Sasaran 1		Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial								
	1.1	Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial			Dokumen	Jumlah Dokumen	1	2	3	4	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Sasaran 1	Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan								
		1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	Jumlah Orang	4	4	4	4	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
		Sub Kegiatan 2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
		Sasaran 1	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
		1.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	2	3	4	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
Kepala Bidang IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA											
Program 1		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa									
Sasaran 1		Meningkatnya anak bangsa yang mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa									
1.1	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa			Persentase	Jumlah Anak yang telah mengikuti pendidikan / jumlah total anak yang ditargetkan x 100%	25%	50%	75%	100%	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
	Kegiatan 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa								
	Sasaran 1		Terlaksananya perumusan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa								
	1.1	Jumlah Rumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa			Dokumen	Jumlah Dokumen	0	1	3	4	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
		Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Sasaran 1	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan								
		1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	Jumlah Orang	75	150	225	300	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	

Sasaran/Indikator				Satuan Target	Formula	PERJANJIAN KINERJA				Penanggung jawab
						Target Kumulatif				
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN										
Kegiatan 1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Sasaran 1		Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah								
1.1	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Daerah yang memadai			%	Jumlah Administrasi keuangan yang harus dipenuhi / jumlah administrasi keuangan yang telah terpenuhi x 100%	25%	50%	75%	100%	Kasubbag Keuangan
Sub Kegiatan 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Sasaran 1		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN								
1.1	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/Bulan	Jumlah Orang per bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan	30	30	30	30	Kasubbag Keuangan
Sub Kegiatan 2		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
Sasaran 2		Tersedianya laporan keuangan								
2.1	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Dokumen	Jumlah Dokumen	3	6	9	12	Kasubbag Keuangan
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN										
Kegiatan 1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Sasaran 1		Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum								
1.1	Persentase Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	Jumlah Administrasi Umum yang harus dipenuhi / jumlah administrasi umum yang telah terpenuhi x 100%	25%	50%	75%	100%	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor								
Sasaran 1		Terpenuhinya sarana dan prasarana listrik penerangan bangunan kantor								
1.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Paket	Jumlah Paket	0	1	1	1	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
Sasaran 2		Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (ATK)								
2.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket	Jumlah Paket	0	1	1	1	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
Sasaran 3		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga								
3.1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Paket	Jumlah Paket	0	0	1	1	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
Sasaran 4		Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu								
4.1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	Jumlah Paket	0	0	2	2	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
Sasaran 5		Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan								
5.1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Paket	Jumlah Paket	0	0	1	3	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
Sasaran 6		Terpenuhinya bahan bacaan melalui media cetak								
6.1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Dokumen	Jumlah Dokumen	0	2	2	2	Kasubbag Umpeg
Sub Kegiatan 7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Sasaran 7		Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD								
7.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	Jumlah Laporan	4	8	11	15	Kasubbag Umpeg
Kegiatan 2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan								
Sasaran 2		Meningkatnya persentase BMD sesuai dengan RKABU perangkat daerah								
2.1	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan			%	anggaran penyediaan BMD / realisasi anggaran penyediaan BMD x 100%	0%	50%	0%	100%	Kasubbag Umpeg

Sub Kegiatan 1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Sasaran 1		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor							
1.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit	0	1	1	1	Kasubbag Umpeg	
Sub Kegiatan 2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Sasaran 2		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor							
2.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit	0	2	2	2	Kasubbag Umpeg	
Kegiatan 3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sasaran 3		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemrintah Daerah							
3.1	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	%	Jumlah Jasa Penunjang yang harus dipenuhi / jumlah jasa Penunjang yang telah terpenuhi x 100%	25%	50%	75%	100%	Kasubbag Umpeg	
Sub Kegiatan 1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Sasaran 1		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
1.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan	2	2	2	2	Kasubbag Umpeg	
Sub Kegiatan 2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Sasaran 2		Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor							
2.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan	5	5	5	5	Kasubbag Umpeg	
Kegiatan 4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Sasaran 4		Meningkatnya ukuran BMD dan sesuai dengan RKPBM							
4.1	Persentase terpeliharanya barang dan bangunan gedung kantor	%	anggaran Pemeliharaan BMD / realisasi anggaran pemeliharaan BMD x 100%	25%	50%	75%	100%	Kasubbag Umpeg	
Sub Kegiatan 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
Sasaran 1		Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan							
1.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Unit	1	4	5	7	Kasubbag Umpeg	
Sub Kegiatan 2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Sasaran 2		Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik							
2.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Unit	0	3	6	10	Kasubbag Umpeg	
Sub Kegiatan 3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Sasaran 3		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik							
3.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Unit	0	0	0	2	Kasubbag Umpeg	

2.7 Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Tabel 2.7 Target Rincian Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Uraian Belanja	Target Belanja (Rp)	Prosentase
Belanja Daerah	38.676.578.376	100%
Belanja Operasional	38.387.044.600	100%
Belanja Pegawai	3.291.782.876	100%
Belanja Barang dan Jasa	5.946.706.224	100%

Belanja Hibah	29.148.555.500	100%
Belanja Modal	289.533.776	100%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.533.776	100%

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 37.826.578.376.- pada Bulan November Tahun 2024 anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 38.676.578.376.- dengan rincian sebagai berikut :

2.4.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran untuk 6 program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Adapun alokasi dan prosentase sebagai berikut :

Tabel. 2.9 Alokasi anggaran Belanja di 6 Program Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Prosentase
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.793.307.444	100%
2	Meningkatnya anak bangsa yang mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	2.320.328.400	100%
3	Meningkatnya kesadaran Ormas dalam melaporkan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	589.423.500	100%

	keberadaannya			
4	Meningkatnya kesadaran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan analisa ekonomi sosial budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	271.622.000	100%
5	Tersalurnya dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.326.280.632	100%
6	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik social	1.375.616.400	100%
Jumlah			38.676.578.376	100%

2.10. Rencana Kinerja Tahun 2024

Berikut merupakan tabel Rencana kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan.

Table 2.10 Tabel Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Persentase capaian TKDN belnaja OPD 60%	4.793.307.444
2	Meningkatnya anak bangsa yang mengikuti pendidikan penguatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti	2.320.328.400

	ideologi pancasila dan karakter bangsa		pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	
3	Meningkatnya kesadaran Ormas dalam melaporkan keberadaannya	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	589.423.500
4	Meningkatnya kesadaran dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan analisa ekonomi sosial budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.Jumlah Kegiatan FKUB 2.Persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (bersih narkoba)	271.622.000
5	Tersalurnya dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	29.326.280.632
6	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social	Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya	1.375.616.400

BAB.III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada tahun 2024 telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. dalam penetapan kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai kinerja dimaksud, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah di tentukan dalam penetapan kinerja Tahun 2024.

A.1 Capaian Tujuan "Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di masyarakat "

Situasi sepanjang tahun 2024 tetap kondusif Hal tersebut tidak lepas dari upaya preventif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan-kegiatan sarasehan kerukunan, sosialisasi/penyuluhan, koordinasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama forum-forum kemitraan terus diharapkan mampu memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup rukun penuh toleransi, saling menghormati dan demokratis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada RENSTRA Tahun 2024-2026.

1. Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di masyarakat	Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	13	Nilai Tahun 2023 (33)	39,40%	Nilai Indeks Toleransi pada tahun 2024 belum dikeluarkan oleh SETARA Institute

Indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan bangsa dan Politik yakni peringkat Nasional angka Indeks Toleransi pada Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh SETARA Institut oleh karena itu masih menggunakan capaian realiasi pada Tahun 2023 senilai 39.40%.

2. Perbandingan antara Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	2021		2022		2023		2024	
			R	C	R	C	R	C	R	C
1	Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di masyarakat	Indeks/angka	n/a	n/a	23	23	33	33	n/a	n/a

Catatan : untuk angka indeks toleransi Tahun 2024 sampai dengan saat ini masih belum dikeluarkan oleh SETARA Institute.

Di lihat dari tabel di atas, selama kurun waktu 3 (Tiga) Tahun tahun dari 2021-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memiliki realisasi Indikator Kinerja Utama yang masih belum mencapai target. Untuk tahun 2021 tidak ada angka capaian dikarenakan SETARA Institute hanya merilis 10 Kota Toleran tertinggi dan 10 Kota Toleran terendah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Keterangan
1.	Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di masyarakat	Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	13	Tahun 2023 (33)	Nilai Indeks Toleransi pada tahun 2024 belum dikeluarkan oleh SETARA Institute

Berdasarkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2024 berdasarkan tabel diatas Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

- a. Indeks Toleransi untuk target RPJMD yaitu Peringkat 13 tetapi untuk realisasi tahun 2024 Kota Palangka Raya masih belum diketahui karena masih menunggu realis dari Setara Institut

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tidak menyajikan informasi terkait hal dimaksud, disebabkan tidak tersedia Standar Nasional atas indikator Kinerja yang ditetapkan tersebut.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2024

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor penghambat ketercapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya beberapa kegiatan yang masih belum bisa terakomodir dengan baik, di karenakan efisiensi dan kurangnya waktu pelaksanaan.
2. Kurangnya kecermatan bidang-bidang dalam memperhatikan indikator dan target program dan kegiatan yang di susun.

3. Masih minimnya SDM yang mengampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasi dengan baik

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya yaitu :

1. Dengan mengevaluasi kembali target pada indikator kinerja pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan bidang-bidang

A.1.1 Capaian Sasaran “ Meningkatkan toleransi dikalangan Masyarakat”

1. Perbandingan antara target dan realiasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realiasi kinerja tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
Meningkatnya kerukunan dan ketertiban di masyarakat	Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	13	Nilai Tahun 2023 (33)	39,40%	Nilai Indeks Toleransi pada tahun 2024 belum dikeluarkan oleh SETARA Institute

Dari Tabel di atas dapat di ketahui bahwa capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada beberapa program yang memenuhi target dan ada juga yang masih belum mencapai target.

Indeks Toleransi Tahun 2024 Kota Palangka Raya berada di urutan 33, yang mana hasil tersebut jauh dari harapan, untuk kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan merevisi target dari indikator kinerja utama, sehingga untuk pencapaian target bisa lebih relevan dan dapat di capai

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator sasaran yang telah di tetapkan dalam

perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada Tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2022
Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Target 2024	2021		2022		2023		2024	
			R	C	R	C	R	C	R	C
Indeks Toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	13	16	16	23	23	33	33	0	0

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2024 pada tabel 3.3 Realisasi Kinerja, dari indikator belum mencapai target yang terpenuhi dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan juga kriteria yang minta masih belum di ketahui. Sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023, berdasarkan tabel 3.2 Realisasi Kinerja, sudah ada peningkatan realisasi terhadap indikator kinerja, sedangkan untuk Tahun 2024 realisasi terhadap indicator yang di capai masih belum mancapai target yang sudah di tentukan, maka untuk kedepanya Badan Kesatuan BAngsa dan Politik akan mereviu kembali target dari indikator utama sehingga untuk pencapaian target bias lebih relevan dan terukur.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menyusun sasaran dan tujuan Perangkat Daerah ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka waktu 5 Tahun atau di sebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang telah disusun dimulai pada Tahun 2024-2026. Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 sampai dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Indeks Toleransi	Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut	13	0	0%

Berdasarkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2024 berdasarkan tabel 3.2 Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

Indeks Toleransi untuk target Renstra yaitu Peringkat 13 tetapi untuk realisasi tahun 2024 Kota Palangka Raya masih belum keluar realisasi dari Setara Institut

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tidak menyajikan informasi terkait hal dimaksud, disebabkan tidak tersedia standar Nasional atas indikator Kinerja yang ditetapkan tersebut.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2024

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor penghambat ketercapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya beberapa kegiatan yang masih belum bisa terakomodir dengan baik, di karenakan efisiensi dan kurangnya waktu pelaksanaan.
2. Kurangnya kecermatan bidang-bidang dalam memperhatikan indikator dan target program dan kegiatan yang di susun.

3. Masih minimnya SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasi dengan baik

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya yaitu :

1. Dengan mengevaluasi kembali target pada indikator kinerja pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan bidang-bidang

B. Analisis atas Efisiensi Dan Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Berikut tabel penghitungan Rata-rata persentase capaian Kinerja :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Rata-rata % Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	33	39,40

* Capaian Peringkat 33 Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi Tahun 2023. Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi Tahun 2024 belum dirilis SETARA Institute

Berikut tabel penghitungan efisiensi sasaran :

Tabel 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi anggaran	% tingkat efisiensi	Ket
1	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	39,40	38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	98,26	40,10	Tidak Efisien
TOTAL				38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	98,26	40,10	

Hasil Analisa efisiensi anggaran Tujuan dan sasaran sebagai Berikut:

Sasaran “Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat” efisiensinya capaian kinerja nya : **Tidak Efektif** dikarenakan oleh faktor belum adanya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yang ditetapkan tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, karena Perda tersebut dapat membantu penilaian skor indeks toleransi sehingga dapat menaikkan peringkat Nasional Indeks Toleransi. Untuk kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya akan mengganti IKU sehingga memenuhi kriteria dapat dicapai (*Achievable*) dan realistis yaitu Indeks Harmoni yang di rekomendasikan Ditjen Polpum Kemendagri agar selaras dari Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Tabel 3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Uraian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi anggaran	% tingkat efisiensi	Ket
Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa								
Indikator : Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	100	100	100,00	2.320.328.400,00	2.261.972.300,00	97,49	102,58	Efisien
Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa								
Indikator : Jumlah Rumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa	4	4	100,00	2.320.328.400,00	2.261.972.300,00	97,49	102,58	Efisien
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	323	107,67	2.320.328.400,00	2.261.972.300,00	97,49	110,44	Efisien
Program : Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik								
Indikator : Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	100	100	100,00	29.326.280.632,00	29.041.590.926,00	99,03	100,98	Efisien
Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik								
Indikator : Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	10	10	100,00	29.326.280.632,00	29.041.590.926,00	99,03	100,98	Efisien
Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah								
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32	32	100,00	29.326.280.632,00	29.041.590.926,00	99,03	100,98	Efisien
Program : Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
Indikator : Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	100	100	100,00	589.423.500,00	554.926.500,00	94,15	106,22	Efisien
Kegiatan : Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas								
Indikator : Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan	16	23	143,75	589.423.500,00	554.926.500,00	94,15	152,69	Efisien

bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas								
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16	23	143,75	589.423.500,00	554.926.500,00	94,15	152,69	Efisien
Program : Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya								
Indikator 1 : Jumlah Kegiatan FKUB	10	10	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30	107,18	Efisien
Indikator 2 : Persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (bersih narkoba)	100	100	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30	107,18	Efisien
Kegiatan : Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial, budaya								
Indikator : Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya	6	6	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30	107,18	Efisien
Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah								
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	6	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30	107,18	Efisien
Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial								
Indikator : Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya	75	75	100,00	1.375.616.400,00	1.238.040.946,00	90,00	111,11	Efisien
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
Indikator : Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial	4	4	100,00	1.375.616.400,00	1.238.040.946,00	90,00	111,11	Efisien

Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	4	100,00	325.616.400,00	276.143.122,00	84,81	117,92	Efisien
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	4	100,00	1.050.000.000,00	961.897.824,00	91,61	109,16	Efisien
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator 1 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70,13	100,19	4.793.307.444,00	4.652.493.476,00	97,06	103,22	Efisien
Indikator 2 : Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	4.793.307.444,00	4.652.493.476,00	97,06	103,03	Efisien
Indikator 3 : Persentase capaian TKDN belanja OPD 60%	60	52,55	87,58	3.701.531.532,00	1.945.164.250,00	52,55	166,67	Efisien
		TOTAL		38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	98,26	114,05	Efisien

C. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melaksanakan 6 Program dengan 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan total anggaran senilai Rp.38.676.578.376,-

C.1 Sasaran “ Meningkatkan Toleransi dikalangan Masyarakat”

Sasaran “Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat” didukung oleh 1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, 2.Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, 3.Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, 4.Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan 5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

C.1.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Capaian Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yaitu 100% dengan Realisasi Anggaran senilai Rp.2.261.972.300,- (97,49%) dengan persentase tingkat efisiensi 102,58% serta faktor yang menunjang keberhasilan Program tersebut yaitu Dukungan dari : Pihak Internal (Pemko,Dinas Pariwisata, dan ASN di Kesbangpol Kota P. Raya) dan Pihak Eksternal (Kepolisian, Tentara dan Alumni Paskibraka). Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah :

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp.2.261.972.300,- (97,49%).

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Capaian Kinerja 107,67% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp.2.261.972.300,- (97,49%).

C.1.3 Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga

pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Capaian Kinerja Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yaitu 100% dengan Realisasi Anggaran senilai Rp. 29.041.590.926,- (99,03%) dengan persentase tingkat efisiensi 100,98% serta faktor yang menunjang keberhasilan Program tersebut yaitu Dukungan dari : Pihak Internal (Pemko, OPD, dan ASN di Kesbangpol Kota P. Raya) dan Pihak Eksternal (KPU, Bawaslu, Polresta, Kodim dan Partai Politik). Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik adalah :

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 29.041.590.926,- (99,03%).

Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 29.041.590.926,- (99,03%).

C.1.4 Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu 100% dengan Realisasi Anggaran senilai Rp. 554.926.500,- (94,15%) dengan persentase tingkat efisiensi 106,22% serta faktor yang menunjang keberhasilan Program tersebut yaitu Dukungan dari : Pihak Internal (Pemko, OPD, dan ASN di Kesbangpol Kota P. Raya) dan Pihak Eksternal (Ormas-Ormas yang melaporkan keberadaannya). Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah :

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas dengan Capaian Kinerja 143,75% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 554.926.500,- (94,15%).

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Capaian Kinerja 143,75% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 554.926.500,- (94,15%).

C.1.5 Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Capaian Kinerja Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yaitu 100% dengan Realisasi Anggaran senilai Rp. 253.432.140,- (93,30%) dengan persentase tingkat efisiensi 107,18% serta faktor yang menunjang keberhasilan Program tersebut yaitu Selalu Berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Sosialisasi Pencegahan Narkoba, Kegiatan Rutin edukasi dan penyuluhan, Kerja sama dengan pihak berwenang (BNN, Kepolisian). Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya adalah :

- a. Kegiatan Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial, budaya dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 253.432.140,- (93,30%).
Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 253.432.140,- (93,30%).

C.1.6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu 100% dengan Realisasi Anggaran senilai Rp. 1.238.040.946,- (90%) dengan persentase tingkat efisiensi 111,11% serta faktor yang menunjang keberhasilan Program tersebut yaitu Dukungan dari : Pihak Internal (Pemko, OPD, dan ASN di Kesbangpol Kota P. Raya) dan Pihak Eksternal (BINDA, Intel Polresta, Intel Kodim dan FKDM). Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 253.432.140,- (93,30%).

Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 276.143.122,- (84,81%).

Sub Kegiatan 2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kotadengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggarannya senilai Rp. 961.897.824,- (91,61%).

D. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya sebesar Rp. 38.676.578.376.- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 38.387.044.600.- dan Belanja Modal Rp. 289.533.776.- Realisasi penggunaan anggaran tersebut di tunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.

Uraian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi anggaran
Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa						
Indikator : Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	100	100	100,00	2.320.328.400,00	2.261.972.300,00	97,49
Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa						
Indikator : Jumlah Rumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa	4	4	100,00	2.320.328.400,00	2.261.972.300,00	97,49
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	323	107,67	2.320.328.400,00	2.261.972.300,00	97,49
Program : Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik						
Indikator : Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	100	100	100,00	29.326.280.632,00	29.041.590.926,00	99,03

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik						
Indikator : Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	10	10	100,00	29.326.280.632,00	29.041.590.926,00	99,03
Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah						
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32	32	100,00	29.326.280.632,00	29.041.590.926,00	99,03
Program : Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
Indikator : Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	100	100	100,00	589.423.500,00	554.926.500,00	94,15
Kegiatan : Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas						
Indikator : Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	16	23	143,75	589.423.500,00	554.926.500,00	94,15
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16	23	143,75	589.423.500,00	554.926.500,00	94,15
Program : Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						
Indikator 1 : Jumlah Kegiatan FKUB	10	10	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30
Indikator 2 : Persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar (bersih narkoba)	100	100	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30
Kegiatan : Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi, sosial, budaya						
Indikator : Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya	6	6	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30
Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah						
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	6	100,00	271.622.000,00	253.432.140,00	93,30

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						
Indikator : Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya	75	75	100,00	1.375.616.400,00	1.238.040.946,00	90,00
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
Indikator : Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial	4	4	100,00	1.375.616.400,00	1.238.040.946,00	90,00
Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	4	100,00	325.616.400,00	276.143.122,00	84,81
Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	4	100,00	1.050.000.000,00	961.897.824,00	91,61
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
Indikator 1 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70,13	100,19	4.793.307.444,00	4.652.493.476,00	97,06
Indikator 2 : Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	4.793.307.444,00	4.652.493.476,00	97,06
Indikator 3 : Persentase capaian TKDN belanja OPD 60%	60	52,55	87,58	3.701.531.532,00	1.945.164.250,00	52,55
		TOTAL		38.676.578.376,00	38.002.456.288,00	98,26

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:
 - Adanya ancaman penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai luhur beretika dan budaya asli bangsa.
 - Adanya perubahan dan perkembangan teknologi yang memudahkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berujung pada pengikisan jati diri bangsa.
 - Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota Palangka Raya.
 - Pendidikan moral dan pembangunan karakter bangsa memerlukan kerja sama yang lebih luas dan mendalam dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat.
2. Adapun beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Organisasi, antara lain:
 - Adanya pola komunikasi dan koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol kota Palangka Raya dengan forum-forum kemitraan dan Kelompok Kerja.
 - Adanya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan instansi vertikal.
 - Keberadaan forum kerukunan umat beragama yang bergerak dalam hal harmonisasi dan toleransi serta penguatan moderasi beragama di Palangka Raya.
 - Terbentuknya Pokja Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Kota Palangka Raya Tahun 2024 dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan antisipasi.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja di masa yang akan datang

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan kelompok kerja dan forum kemitraan.
2. Kolaborasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan dan instansi vertikal sebagai upaya preventif atas segala bentuk potensi instabilitas keamanan wilayah.
3. Upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kota Palangka Raya, khususnya pada kalangan remaja melalui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan pembentukan satuan tugas anti narkoba.
4. Upaya minimalisasi tindak pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan beragama di daerah yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial.
5. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum melalui sosialisasi pendidikan politik.
6. Kolaborasi dengan berbagai elemen dalam rangka mengoptimalkan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan guna mengantisipasi dan menangkal gejala atau potensi yang akan mengarah kepada timbulnya disintegrasi bangsa.
7. Mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Ormas di kota Palangka Raya guna meningkatkan keberdayaan dan kemandirian Ormas.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat menjadi tolok ukur bagi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang lebih baik ditahun mendatang.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tidak terlepas dari Kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sekali lagi diperlukan kritik membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan.